

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kolaborasi dalam program *Skill Development Centre* (SDC) di Kota Padang dilaksanakan oleh beberapa unsur yakni pemerintah, lembaga pelatihan kerja/Diklat, dan Dudi dengan tujuan kolaborasi ini ialah tersedianya pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan serta tersedianya penempatan tenaga kerja. Dalam pengimplementasiannya *stakeholder* yang peneliti pilih sebagai informan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Hem's Institute Kota Padang, dan Rumah Batik Putiandam

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai proses kolaborasi dalam pelaksanaan program *Skill Development Centre* (SDC) di Kota Padang maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan teori Ansell dan Gash, proses kolaborasi dalam pelaksanaan SDC sudah berjalan baik dengan tercapainya tujuan dari program ini yaitu terdapatnya penempatan kerja untuk peserta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut bisa dilihat pada dimensi kepemimpinan fasilitatif dalam eksplorasi keuntungan yang sudah baik karena keuntungan diperoleh oleh para *stakeholder* yang berkolaborasi dalam program SDC. Pada desain kelembagaan dalam tranparansi yang dilakukan sudah baik karena keterbukaan terhadap seluruh informasi kepada seluruh *stakeholder*. Kemudian pada proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan yang sudah terlaksana dengan baik, dimana para *stakeholder* menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan saling menerima akan masukan yang diberikan, sehingga menciptakan komitmen terhadap proses kolaborasi. Serta tercapainya tujuan dari program SDC itu sendiri yakni tersedianya penempatan bagi tenaga kerja yang sudah dilatih atau terlatih.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu pada kepemimpinan fasilitatif dalam memfasilitasi dialog masih terdapatnya *stakeholder* yang terkendala akan anggaran sehingga menunggu undangan dari *stakeholder* yang bisa memfasilitasi dialog. Desain kelembagaan pelaksanaan kolaborasi SDC masih belum maksimal karena dalam partisipasi para *stakeholder* dalam pertemuan yang diadakan masih banyak yang belum aktif. Kemudian dalam aturan dasar yang jelas, tidak terdapatnya kesepakatan bersama oleh para *stakeholder* melainkan hanya mengandalkan Surat Keputusan Walikota dan MOU antar *stakeholder* yang memiliki kesempatan dan kesepakatan untuk bekerjasama untuk memenuhi pelatihan maupun penempatan atau keduanya. Lalu pada proses kolaborasi yakni pada dialog tatap muka sering terlaksana pada pembahasan yang sama atau berulang dari awal, sebab terjadinya *rolling*/mutasi pejabat yang menjadi *stakeholder* dalam program SDC.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan terkait *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program *Skill Development Centre* (SDC) di Kota Padang sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada proses kolaborasi, pemerintah dan para *stakeholder* lebih memperjelas peran serta komitmen dalam kolaborasi. Agar pelaksanaan kolaborasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak saling menunggu pergerakan dari *stakeholder* lain untuk memulai, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai dengan berkolaborasi.
2. Disarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang sebagai pemerintah lebih gencar lagi mengajak dan menyuarakan kegiatan yang berbentuk kolaborasi kepada seluruh OPD yang ada dan melakukan komunikasi yang lebih erat agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

3. Disarankan pemerintah dapat memfokuskan aturan dasar yang jelas dalam berkolaborasi agar terdapatnya pedoman bagi *stakeholder* yang berkolaborasi maupun *stakeholder* yang mengalami pergantian/perubahan.
4. Untuk Lembaga pelatihan/Diklat diharapkan agar lebih menggaet DuDi (Dunia Usaha Dunia Industri) agar bisa melakukan kerjasama dalam hal penempatan kerja untuk peserta hasil pelatihan.
5. Untuk DuDi diharapkan agar lebih gencar mencari peluang dan memberikan peluang kerjasama dengan pemerintah dan Diklat agar bisa memberikan penempatan kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran terlatih.

